

DAMPAK KERUSUHAN 1997 TERHADAP INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

Aiga Herawati¹, Muhammad Rifky Ramadhani², Muhammad Ridho³,

Siti Nur Hikmah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Lambung Mangkurat

¹aigaaherawati@gmail.com, ²muhammadrifkyramadhani540@gmail.com,

³mhmmdridho040@gmail.com, ⁴stnurhikmah001@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of the 1997 Banjarmasin Riots on the state of infrastructure in the city of Banjarmasin. The study employs a historical method involving the stages of source collection, source criticism, interpretation, and historical writing. Data was obtained from various sources such as books, academic journals, archives, and newspaper articles relevant to the events. The research findings indicate that the 1997 riots caused significant damage to various city infrastructures, particularly to commercial centers, retail stores, commercial buildings, and public facilities. Additionally, the riots disrupted city services and the socio-economic activities of the community. The impact of this infrastructure damage was not merely physical but also affected the economic and social lives of the community over a considerable period. This study confirms that social conflict has multidimensional impacts encompassing social, economic, and physical aspects of the region. Therefore, social stability is a crucial factor in supporting the sustainability of urban development and preventing more extensive damage in the future.

Keywords: 1997 Banjarmasin Riots, Social conflict, Urban infrastructure, Impact of riots, and Local history.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Kerusuhan Banjarmasin 1997 terhadap kondisi infrastruktur Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan tahapan pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, serta berita surat kabar yang relevan dengan peristiwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusuhan tahun 1997 menyebabkan kerusakan yang signifikan pada berbagai infrastruktur kota, terutama pada pusat perdagangan, pertokoan, bangunan komersial, serta fasilitas umum. Selain itu, kerusuhan juga mengganggu layanan kota dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dampak kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik sosial memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan fisik wilayah. Oleh karena itu, stabilitas sosial menjadi faktor

penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan kota serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas di masa depan.

Kata Kunci: Kerusuhan Banjarmasin 1997, Konflik sosial, Infrastruktur kota, Dampak kerusuhan, dan Sejarah lokal.

A. Pendahuluan

Konflik sosial merupakan fenomena yang inheren dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dalam perspektif sosiologi klasik, Dahrendorf (1959) menegaskan bahwa konflik bukan sekadar disfungsi sosial, melainkan bagian dari mekanisme perubahan struktural yang terjadi ketika ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya tidak mampu diakomodasi oleh sistem yang ada. Senada dengan itu, Coser (1956) berpandangan bahwa konflik memiliki fungsi ganda: di satu sisi dapat menjadi katalis perubahan sosial, namun di sisi lain dapat menimbulkan kehancuran apabila tidak dikelola secara tepat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk secara etnis, agama, dan kelas sosial, potensi konflik selalu hadir sebagai ancaman laten yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kerusuhan massal ketika

tekanan politik dan ekonomi mencapai titik kritis.

Salah satu dimensi yang sering luput dari perhatian dalam kajian konflik sosial adalah dampaknya terhadap infrastruktur fisik perkotaan. Infrastruktur kota, yang mencakup pusat perdagangan, jaringan transportasi, fasilitas umum, serta bangunan komersial, merupakan sistem penopang utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat urban (Koentjaraningrat, 2009). Ketika kerusuhan terjadi, infrastruktur menjadi sasaran langsung tindakan massa dalam bentuk pembakaran, penjarahan, dan perusakan. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak jangka pendek berupa terhentinya aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi daerah, serta proses pembangunan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak konflik sosial

terhadap infrastruktur kota menjadi sangat relevan, khususnya dalam upaya memahami dinamika pemulihan pascakonflik secara komprehensif.

Kerusuhan yang melanda sejumlah kota besar di Indonesia pada tahun 1997 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik nasional yang tengah bergejolak. Masa akhir pemerintahan Orde Baru ditandai oleh akumulasi ketegangan yang bersumber dari berbagai arah: krisis ekonomi yang mulai merembes, persaingan politik yang semakin sengit menjelang Pemilihan Umum 1997, serta meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kesenjangan ekonomi yang mencolok antara kelompok elite dan masyarakat bawah. Trijono (1997) mencatat bahwa ketegangan politik antara Golkar dan PPP menjadi pemicu langsung serangkaian kerusuhan di berbagai kota, di antaranya Pekalongan pada 24–26 Maret 1997, Jakarta pada 18 Mei 1997, dan puncaknya di Banjarmasin pada 23 Mei 1997. Ketiga peristiwa ini menunjukkan pola yang serupa: kerusuhan bermula dari gesekan kampanye politik yang kemudian

berubah menjadi ledakan kemarahan sosial yang tidak terkendali, membawa dampak destruktif terhadap berbagai fasilitas dan infrastruktur kota.

Di antara serangkaian kerusuhan yang terjadi pada periode tersebut, Kerusuhan Banjarmasin 23 Mei 1997 tercatat sebagai yang paling besar dan paling destruktif. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan sebutan "Jumat Kelabu" ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan serta menyebabkan kerusakan fisik yang sangat luas di berbagai kawasan strategis Kota Banjarmasin (Khotimah, 2017). Kerusuhan ini tidak hanya menghancurkan kawasan perdagangan dan permukiman, tetapi juga melumpuhkan seluruh sistem layanan kota dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dari sudut pandang sejarah lokal, peristiwa ini merupakan salah satu titik balik penting yang memengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan fisik Kota Banjarmasin hingga beberapa tahun setelahnya. Memahami peristiwa ini secara mendalam, khususnya dari aspek

kerusakan infrastruktur, menjadi bagian penting dari upaya dokumentasi dan refleksi sejarah lokal yang bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji berbagai dimensi dari peristiwa Kerusuhan Banjarmasin 1997. Rahayu (2019) memfokuskan kajiannya pada dampak kerusuhan terhadap komunitas etnis Tionghoa di Kecamatan Banjarmasin Tengah, khususnya dari sisi kerugian ekonomi dan perubahan kehidupan sosial pascakonflik. Sementara itu, Khotimah (2017) mengkaji peristiwa ini dari perspektif memori kolektif masyarakat dengan pendekatan resolusi konflik, menekankan pentingnya rekonsiliasi sosial sebagai langkah pencegahan konflik serupa di masa depan. Alfarius dkk. (2023) melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis strategi adaptasi dan ketahanan komunitas etnis Tionghoa dalam membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka pasca kerusuhan. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak sosial dan ekonomi dari peristiwa ini,

terdapat satu dimensi yang masih belum dikaji secara memadai, yakni dampak kerusuhan terhadap kondisi fisik infrastruktur Kota Banjarmasin. Padahal, infrastruktur merupakan fondasi material yang menentukan kapasitas sebuah kota untuk pulih dan berkembang pascakonflik.

Berdasarkan kesenjangan kajian yang telah diidentifikasi, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan secara khusus mengkaji dampak Kerusuhan Banjarmasin 1997 terhadap kondisi infrastruktur kota. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat kerusuhan, serta menganalisis bagaimana kerusakan tersebut memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Kota Banjarmasin dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda: secara akademis sebagai pelengkap dokumentasi sejarah lokal Kalimantan Selatan, dan secara praktis sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam

merancang kebijakan mitigasi konflik serta strategi pemulihan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah (*historical method*). Metode sejarah dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji peristiwa masa lampau secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk menghasilkan rekonstruksi yang akurat mengenai dampak Kerusuhan Banjarmasin 1997 terhadap infrastruktur kota. Menurut Kuntowijoyo (2013), metode sejarah merupakan seperangkat prosedur ilmiah yang digunakan sejarawan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis sumber-sumber sejarah guna menghasilkan narasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan ini dipandang paling tepat mengingat peristiwa yang dikaji telah berlalu hampir tiga dekade, sehingga rekonstruksi fakta harus dilakukan melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber yang tersedia, baik primer maupun sekunder.

Proses penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis sebagaimana dirumuskan oleh Gottschalk (1985), yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pertama, heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Kerusuhan Banjarmasin 1997, meliputi buku, jurnal ilmiah terindeks, arsip daerah, berita surat kabar sezaman, serta sumber lisan berupa kesaksian masyarakat yang secara langsung menyaksikan atau terdampak peristiwa tersebut. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui penelusuran di berbagai repositori, di antaranya perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, Arsip Daerah Kalimantan Selatan, serta basis data jurnal daring seperti Google Scholar dan SINTA.

Kedua, kritik sumber, yaitu proses seleksi dan pengujian kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber dilakukan dalam dua dimensi: kritik ekstern untuk menguji keaslian dan

keotentikan sumber, serta kritik intern untuk mengevaluasi kebenaran dan relevansi isi informasi yang terkandung dalam sumber tersebut (Sjamsuddin, 2007). Pada tahap ini, sumber-sumber yang tidak memenuhi standar kredibilitas atau tidak relevan dengan fokus penelitian disingkirkan, sementara sumber yang lolos seleksi dijadikan basis untuk rekonstruksi fakta sejarah.

Ketiga, interpretasi, yaitu tahap pemaknaan dan penafsiran fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh untuk membangun pemahaman yang koheren mengenai hubungan kausal antara peristiwa kerusuhan dan dampaknya terhadap infrastruktur kota. Proses interpretasi dilakukan dengan mengacu pada kerangka teoretis konflik sosial yang telah dirumuskan dalam tinjauan pustaka, sehingga fakta-fakta empiris dapat dijelaskan dalam konteks yang lebih luas.

Keempat, historiografi, yaitu tahap penulisan hasil penelitian secara sistematis, kronologis, dan ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Pada tahap ini, seluruh temuan

disusun dalam narasi yang argumentatif, didukung oleh bukti-bukti dari sumber yang telah diverifikasi, dan disajikan sesuai dengan konvensi penulisan ilmiah yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Sumber primer meliputi arsip dokumen pemerintah daerah Kota Banjarmasin tahun 1997–1998, berita surat kabar sezaman seperti Banjarmasin Post dan Media Indonesia yang meliput langsung peristiwa kerusuhan, serta kesaksian lisan dari masyarakat yang menjadi saksi atau korban langsung peristiwa tersebut. Sumber sekunder meliputi buku, skripsi, dan artikel jurnal ilmiah yang secara khusus mengkaji Kerusuhan Banjarmasin 1997 dari berbagai perspektif, di antaranya karya Rahayu (2019), Khotimah (2017), dan Alfarius dkk. (2023).

C. Hasil Dan Pembahasan

Peristiwa Kerusuhan Banjarmasin 23 Mei 1997 tidak dapat dipahami secara utuh tanpa terlebih dahulu menelaah konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil wawancara

dengan narasumber yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, situasi kota Banjarmasin menjelang kerusuhan sudah diselimuti ketegangan yang bersumber dari aktivitas kampanye politik partai-partai peserta Pemilu 1997. Mobilisasi massa dalam skala besar yang semula bersifat politis kemudian bertransformasi menjadi ketegangan sosial yang sulit dikendalikan. Hal ini sejalan dengan temuan Trijono (1997) yang menegaskan bahwa persaingan antara Golkar dan PPP dalam kampanye Pemilu 1997 menjadi katalis utama yang menyulut serangkaian kerusuhan di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Banjarmasin. Dinamika ini menunjukkan bahwa kerusuhan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari ketegangan yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan akhirnya meledak ketika menemukan momentum yang tepat.

Eskalasi kerusuhan Banjarmasin tidak sepenuhnya bersifat spontan. Berdasarkan penuturan narasumber, situasi di lapangan menjadi semakin kompleks

akibat adanya infiltrasi dari pihak luar yang secara sistematis memperluas skala dan intensitas kerusuhan. Mahasiswa disebut sebagai salah satu kelompok yang terlibat dalam aksi-aksi penentangan terhadap pemerintahan Orde Baru, namun gerakan mereka dengan cepat terkontaminasi oleh provokasi dan isu-isu yang berkembang liar di tengah masyarakat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori psikologi massa Le Bon (1895), yang menyatakan bahwa individu dalam kerumunan besar cenderung kehilangan kendali rasional dan mudah tersulut untuk melakukan tindakan destruktif yang melampaui tujuan awal gerakan. Dalam konteks Banjarmasin, kondisi ini mengakibatkan kerusuhan menyebar dengan cepat ke berbagai kawasan kota, jauh melampaui titik-titik awal konfrontasi politik yang semula menjadi pemicunya. Pemerintah merespons dengan memberlakukan jam malam dan mengerahkan aparat keamanan, namun skala kerusuhan yang meluas dalam waktu singkat membuat upaya pengendalian tersebut tidak sepenuhnya efektif.

Dampak paling kasat mata dari Kerusuhan Banjarmasin 1997 adalah kehancuran yang menimpa kawasan perdagangan sebagai jantung perekonomian kota. Kawasan yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama Pasar Sudimampir dan berbagai kawasan pertokoan di pusat kota, berubah menjadi lokasi penjarahan dan pembakaran massal yang dilakukan oleh massa yang tidak terkendali. Rahayu (2019) mendokumentasikan bahwa kerusuhan menyebabkan banyak toko milik pedagang, yang sebagian besar merupakan komunitas etnis Tionghoa, mengalami kerusakan parah akibat penjarahan dan pembakaran, sehingga para pedagang kehilangan tempat usaha sekaligus seluruh modal yang telah mereka kumpulkan. Keterangan narasumber memperkuat temuan ini, dengan menggambarkan secara vivid bagaimana penjarahan terjadi secara masif di berbagai fasilitas umum dan pusat perdagangan dalam waktu yang sangat singkat namun dengan intensitas yang luar biasa. Kerugian material yang ditimbulkan tidak hanya berskala individual, tetapi secara kolektif

melumpuhkan sistem perdagangan kota yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Di luar kawasan perdagangan, kerusuhan juga menimbulkan kerusakan serius pada berbagai bangunan kota dan fasilitas umum yang menjadi infrastruktur pendukung kehidupan urban. Khotimah (2017) mencatat bahwa peristiwa 23 Mei 1997 menyebabkan berbagai bangunan di Kota Banjarmasin mengalami kerusakan akibat pembakaran dan penjarahan yang dilakukan oleh massa. Kerusakan tidak terbatas pada toko dan pusat perbelanjaan, tetapi juga merambah ke hotel, kantor, dan berbagai bangunan komersial lainnya yang berada di sekitar lokasi kerusuhan. Dalam perspektif infrastruktur kota, kerusakan semacam ini memiliki implikasi yang jauh melampaui nilai material bangunan itu sendiri. Grigg (1988) menegaskan bahwa infrastruktur merupakan sistem vital yang saling bergantung satu sama lain, sehingga kerusakan pada satu komponen akan secara langsung mengganggu fungsi komponen lainnya. Kondisi ini menjelaskan mengapa dampak

kerusuhan tidak hanya dirasakan oleh pemilik bangunan yang rusak, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat yang bergantung pada infrastruktur tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kerusuhan yang berlangsung intens dalam waktu singkat tersebut mengakibatkan kelumpuhan total pada berbagai layanan kota yang biasanya menjadi penopang kehidupan sehari-hari masyarakat Banjarmasin. Alfarius dkk. (2023) mencatat bahwa aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin terhenti sementara karena banyak fasilitas umum yang tidak dapat berfungsi secara normal. Narasumber memperkuat gambaran ini dengan menyebutkan bahwa situasi keamanan yang tidak stabil akibat kerusuhan, diperparah dengan pemberlakuan jam malam oleh aparat, menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi ketakutan dan ketidakpastian yang mendalam. Pusat perdagangan ditutup, transportasi tidak berjalan normal, dan berbagai aktivitas ekonomi terhenti total. Kondisi ini secara langsung mengakibatkan terputusnya mata rantai pasokan

barang dan jasa yang selama ini menopang kehidupan urban, sehingga masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada aktivitas harian, menanggung beban terberat dari kelumpuhan ini.

Dampak kerusuhan Banjarmasin 1997 tidak berhenti pada kerusakan fisik yang terjadi pada 23 Mei itu saja, melainkan meninggalkan luka jangka panjang yang memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Alfarius dkk. (2023) menjelaskan bahwa pascakerusuhan, masyarakat harus menghadapi berbagai kesulitan ekonomi akibat kerusakan tempat usaha dan hilangnya sumber pendapatan. Banyak pedagang yang tidak mampu kembali menjalankan usaha dalam waktu singkat karena kehilangan tidak hanya bangunan tempat usaha, tetapi juga seluruh stok barang dan modal kerja yang dijarah massa. Proses pemulihan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama semakin memperparah kondisi ini, karena selama infrastruktur belum pulih, aktivitas ekonomi pun tidak dapat kembali

berjalan normal. Dari perspektif sosial, narasumber menggambarkan bahwa peristiwa ini meninggalkan trauma kolektif yang mendalam bagi masyarakat, mengubah pola interaksi sosial antarkelompok, dan menciptakan ketidakpercayaan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan.

D. Kesimpulan

Kerusuhan Banjarmasin 23 Mei 1997 terbukti memberikan dampak multidimensional terhadap kondisi infrastruktur dan kehidupan masyarakat kota. Kerusakan yang terjadi meliputi kawasan perdagangan seperti Pasar Sudimampir, bangunan komersial, fasilitas umum, hingga lumpuhnya sistem layanan kota secara menyeluruh. Eskalasi konflik yang dipercepat oleh ketegangan politik, dinamika psikologi massa, serta infiltrasi aktor eksternal menyebabkan kerusakan yang jauh melampaui kapasitas pengendalian aparat dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil wawancara narasumber, situasi tersebut menciptakan kondisi ketakutan dan ketidakpastian yang melumpuhkan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi

masyarakat, diperparah dengan pemberlakuan jam malam yang semakin membatasi ruang gerak warga. Dampak kerusakan ini terbukti tidak berhenti pada kerusakan fisik semata, melainkan meninggalkan implikasi jangka panjang terhadap kehidupan ekonomi dan memori kolektif masyarakat Banjarmasin. Banyak pedagang yang kehilangan tempat usaha dan modal secara sekaligus, sementara proses pemulihan infrastruktur membutuhkan waktu dan investasi yang sangat besar. Peristiwa "Jumat Kelabu" ini sekaligus menjadi penanda penting transisi politik Indonesia dari Orde Baru menuju era Reformasi. Oleh karena itu, stabilitas sosial harus dipahami sebagai prasyarat fundamental pembangunan kota, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam strategi pemulihan infrastruktur pascakonflik serta peran pemerintah daerah dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarius, W., dkk. (2023). Bertahan melewati krisis: Etnis Tionghoa pasca kerusuhan 23 Mei 1997

- di Banjarmasin. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES)*, 6(1).
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, Penerjemah). UI Press.
- Grigg, N. S. (1988). *Infrastructure engineering and management*. John Wiley & Sons.
- Khotimah, H. (2017). Collective memory "Jum'at Kelabu" di Banjarmasin: Perspektif resolusi konflik atas peristiwa 23 Mei 1997. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 173–188.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Le Bon, G. (1895). *The crowd: A study of the popular mind*. Macmillan.
- Rahayu. (2019). *Dampak kerusuhan 23 Mei 1997 terhadap etnis Tionghoa di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah 1997–2003* (Skripsi). Universitas Lambung Mangkurat.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Trijono, L. (1997). Paradoks demokrasi di Indonesia: Kerusuhan pada masa kampanye Pemilu 1997. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik)*, 1(2).